



Evaluasi Manajemen Otonomi Pendidikan Islam di MTs Darunnajah Kabupaten Kerinci: Pendekatan Metode Evaluasi untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan

Vegia Oviensy^{*1}, Ahmad Sabri¹, Remiswal¹, Ahmad Jamin²

¹Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia

²Institut Agama Islam Negeri Kerinci, Indonesia

Vegiaoviensy4375@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi manajemen otonomi pendidikan Islam di MTs Darunnajah Kabupaten Kerinci dengan menggunakan metode penelitian evaluasi. Pendidikan Islam yang diterapkan di lembaga ini berupaya untuk menciptakan sistem yang mandiri dan berkualitas melalui otonomi yang diberikan pada pengelolaan kurikulum, sumber daya, serta kebijakan pendidikan. Namun, tantangan yang dihadapi dalam implementasinya perlu dievaluasi agar dapat meningkatkan efektivitas dan kualitas pendidikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product), yang mencakup analisis konteks kebijakan otonomi, sumber daya yang tersedia, proses manajerial yang dilakukan, serta produk atau hasil yang dicapai oleh lembaga pendidikan. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen otonomi pendidikan Islam di MTs Darunnajah Kabupaten Kerinci sudah berjalan cukup baik, namun masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki, terutama dalam hal pembiayaan, pelatihan tenaga pengajar, serta evaluasi pembelajaran yang lebih sistematis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi pengembangan manajemen pendidikan Islam di lembaga serupa, dengan tujuan meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan.

Kata Kunci: Manajemen Otonomi, Pendidikan Islam, Evaluasi, CIPP.

Abstract

This research aims to facilitate the autonomous management of Islamic education at MTs Darunnajah, Kerinci Regency using evaluation research methods. The Islamic education implemented at this institution seeks to create an independent and quality system through the autonomy given to the management of curriculum, resources and educational policies. However, the challenges faced in its implementation need to be evaluated in order to improve the effectiveness and quality of education. This research uses the CIPP (Context, Input, Process, Product) evaluation approach, which includes analysis of the autonomy policy context, available resources, managerial

processes carried out, as well as the products or results achieved by educational institutions. Data was collected through interviews, observation and documentation, which was then analyzed descriptively. The results of the research show that the autonomous management of Islamic education at MTs Darunnajah, Kerinci Regency has gone quite well, but there are still several aspects that need to be improved, especially in terms of financing, teaching staff training, and more systematic learning evaluation. It is hoped that this research can provide constructive recommendations for the development of Islamic education management in similar institutions, with the aim of improving the overall quality of education.

Keywords: *Autonomous Management, Islamic Education, Evaluation, CIPP*

I. PENDAHULUAN

Pengelolaan pendidikan selalu mengalami perubahan dari masa ke masa. Perubahan itu pada lazimnya mengikuti perubahan yang terjadi dalam pengelolaan sebuah negara. Di Indonesia, pendidikan memasuki era baru manajemen pendidikan setelah terjadinya reformasi, dimana otonomi pendidikan merupakan salah satu buah dari otonomi daerah yang dilegitimasi berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Amini & Ginting, 2020). Jika dilihat dari sisi lembaga pendidikan, maka otonomi di bidang pendidikan dimaknai sebagai pengelolaan pendidikan dengan menyerahkan kewenangan lebih besar kepada satuan pendidikan untuk mengurus dan mengembangkan kegiatan pendidikan di satuan pendidikannya (Basri, 2021).

Salah satu dampak positif yang diinginkan dari penerapan otonomi model MBS adalah agar terciptanya kepercayaan diri sehingga muncul kreativitas dan prakarsa dari semua elemen dalam masyarakat setempat untuk memajukan lembaga pendidikan mereka (Afandi et al., 2022). Diantara pembahasan yang menjadi polemik adalah kedudukan lembaga pendidikan Islam seperti madrasah yang berada dalam naungan Kementerian Agama sebagai lembaga vertikal yang tidak diterapkan otonomi (Lawati, 2021). Posisi madrasah dalam kasus ini dianggap bagian dari agama sehingga tidak diberlakukan otonomi. Sementara di sisi lain pendidikan dianggap bukan sebagai bagian dari agama, tetapi sebagai bagian dari pendidikan yang diberlakukan otonomi (Raja, et al., 2023).

Alternatif yang mengemukakan adalah gagasan untuk menyatukan Dirjen yang mengurus pendidikan di Kementerian Agama ke dalam Dinas Pendidikan di daerah

sehingga pendidikan Islam yang ada didalamnya menjadi otonom, atau tetap berada di bawah Kementerian Agama dengan mengikuti kebijakannya dalam hal pendidikan Islam secara umum, tetapi pengelolaan kelembagaan dan perkara teknis lainnya menjadi otonomi di bawah pemerintah daerah (Indrawan, 2024). Akmal Hawi yang lebih cenderung dengan mempertahankan eksistensi madrasah di bawah Kementerian Agama berpendapat bahwa otonomi tetap dapat diimplementasikan, tetapi menyatukan pendidikan Islam di bawah satu atap dengan Diknas menjadi tidak realistis karena ada pertimbangan kekhasan pengetahuan dan keahlian yang menjadi kewenangan dan keahlian Kementerian Agama (mansyur, 2023).

Analisis lain yang dikemukakan oleh Umam dengan menggunakan pendekatan manajemen mutu pendidikan Islam, nampaknya tidak tertarik mendiskusikan posisi kelembagaan pendidikan Islam. Akan tetapi, yang terpenting baginya adalah mutu pengelolaan pendidikan yang mesti dipertahankan dan ditingkatkan melalui optimalisasi fungsi standar pendidikan nasional sebagai dasar dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pendidikan, untuk menjamin mutu pendidikan, serta dilakukan penyempurnaan secara terarah dan berkelanjutan (mansyur, 2023). M. Daud Yahya menyodorkan pertimbangan bahwa yang paling penting sebenarnya bukan masalah posisinya, melainkan bahwa madrasah tetap bisa mengembangkan diri dan tetap mempertahankan eksistensinya sebagai wadah membina ruh dan praktek kehidupan keislaman.

Pendidikan Islam di Indonesia, khususnya di tingkat Madrasah Tsanawiyah (MTs), memegang peranan penting dalam membentuk karakter dan kualitas sumber daya manusia yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Salah satu aspek yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan di lembaga pendidikan Islam adalah penerapan manajemen otonomi. Manajemen otonomi dalam konteks ini berarti memberikan kewenangan yang lebih besar kepada madrasah untuk mengelola kurikulum, sumber daya manusia, pembiayaan, dan kebijakan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal tanpa terlalu bergantung pada kebijakan dari pusat atau daerah.

MTs Darunnajah Kabupaten Kerinci, sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam, telah menerapkan konsep otonomi dalam pengelolaan pendidikan. Namun, meskipun otonomi memberikan kebebasan dalam pengambilan keputusan, belum diketahui secara

pasti sejauh mana implementasi manajemen otonomi ini berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan. Oleh karena itu, evaluasi terhadap manajemen otonomi pendidikan Islam di MTs Darunnajah menjadi sangat penting untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan berbagai aspek pendidikan di madrasah ini.

Beberapa isu yang muncul terkait dengan manajemen otonomi di MTs Darunnajah antara lain keterbatasan sumber daya yang ada, baik itu dalam hal tenaga pengajar, infrastruktur, maupun pembiayaan, yang dapat mempengaruhi kualitas pendidikan yang diberikan. Selain itu, proses pengelolaan pendidikan yang tidak terstruktur dengan baik serta kurangnya evaluasi terhadap program-program yang sudah dijalankan, dapat menjadi hambatan dalam mencapai tujuan pendidikan yang optimal.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain evaluasi untuk menilai manajemen otonomi pendidikan Islam yang diterapkan di MTs Darunnajah Kabupaten Kerinci. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana manajemen otonomi yang diterapkan di madrasah tersebut berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Pendekatan evaluasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah model CIPP (Context, Input, Process, Product), yang mencakup analisis terhadap konteks, input, proses, dan produk dari manajemen otonomi pendidikan Islam yang dijalankan di MTs Darunnajah.

Adapun, fokus penelitian ini terbagi dalam empat komponen utama. Pertama, aspek konteks, yang meliputi analisis kebijakan, kondisi sosial dan budaya, serta faktor eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan manajemen otonomi di madrasah. Kedua, aspek input, yang melibatkan sumber daya yang tersedia, termasuk tenaga pendidik, sarana dan prasarana, serta dana yang digunakan dalam proses pendidikan. Ketiga, aspek proses, yang meliputi bagaimana pengelolaan pendidikan dilakukan, termasuk pengambilan keputusan, perencanaan, serta pelaksanaan kebijakan pendidikan di tingkat madrasah. Keempat, aspek produk, yang mengukur hasil dari implementasi manajemen otonomi, baik dalam hal prestasi siswa, kualitas pengajaran, serta pencapaian tujuan pendidikan yang ditetapkan.

Penelitian ini dilaksanakan di MTs Darunnajah Kabupaten Kerinci, yang merupakan lembaga pendidikan Islam yang menerapkan manajemen otonomi dalam pengelolaan pendidikannya. Penelitian ini berlangsung selama enam bulan, dari bulan Januari hingga Juni 2024, dengan tujuan memperoleh data yang representatif dan mendalam mengenai pelaksanaan manajemen otonomi di madrasah tersebut. Subjek dalam penelitian ini meliputi kepala madrasah, staf pengelola, guru-guru, serta siswa-siswa yang terlibat langsung dalam proses pendidikan di MTs Darunnajah.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui berbagai teknik, antara lain wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan kepala madrasah, guru, staf pengelola, dan siswa untuk memperoleh informasi mengenai penerapan manajemen otonomi dan dampaknya terhadap kualitas pendidikan. Observasi dilakukan untuk melihat langsung proses pembelajaran dan pengelolaan pendidikan yang berjalan di madrasah, sementara dokumentasi mencakup pengumpulan dokumen kebijakan, rencana kerja, laporan keuangan, serta catatan evaluasi yang terkait dengan manajemen pendidikan di madrasah tersebut.

Untuk menganalisis data yang diperoleh, penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Data yang dikumpulkan akan dianalisis secara sistematis untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam penerapan manajemen otonomi di MTs Darunnajah. Reduksi data akan dilakukan dengan mengelompokkan informasi berdasarkan komponen CIPP, kemudian hasilnya diinterpretasikan untuk memahami dampak dari manajemen otonomi terhadap kualitas pendidikan. Penarikan kesimpulan akan dilakukan berdasarkan analisis tersebut, dan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi konstruktif untuk perbaikan manajemen pendidikan di madrasah.

Dalam menjaga validitas dan reliabilitas data, penelitian ini akan menerapkan triangulasi sumber data. Hal ini dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memastikan konsistensi informasi yang diperoleh. Selain itu, penelitian ini juga akan mengikuti prinsip etika penelitian, dengan memperoleh izin dari pihak berwenang di MTs Darunnajah dan menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari subjek penelitian. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan

manajemen pendidikan Islam di madrasah tersebut dan lembaga pendidikan Islam lainnya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian dan Konsep Dasar Otonomi Pendidikan

Otonomi atau *autonomy* berasal dari bahasa Yunani *autos* yang berarti sendiri, dan *nomos* yang berarti Hukum atau aturan. Dalam konteks etimologis ini, Otonomi diartikan sebagai “perundangan sendiri”, “mengatur atau memerintah sendiri” Tilaar lebih lanjut mengemukakan bahwa menurut perkembangan sejarahnya di Indonesia, otonomi selain mengandung arti “perundangan”, juga mengandung pengertian “pemerintahan”(Ristianah, 2022).

Menurut slamet seorang dosen pasca sarjana Universitas Negeri Yogyakarta dan konsultan (internatuonal) Direktorat Pendidikan Menengah Umum mengatakan bahwa “otonomi pendidikan adalah kewenangan lembaga pendidikan untuk mengatur dan mengurus kepentingan warga sekolah menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi warga sekolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan pendidikan nasional yang berlaku”(rasiman, 2022)

Otonomi pendidikan adalah desentralisasi pendidikan guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pendidikan untuk mencapai tingkat kualitas pendidikan pada lembaga pendidikan (sekolah) yang dikelola sendiri oleh penyelenggara pendidikan(hidayat, 2020). Otonomi pendidikan merujuk pada pemberian wewenang dan tanggung jawab dalam pengelolaan pendidikan kepada daerah, dengan tetap mempertimbangkan kewenangan pemerintah pusat. Konsep ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui desentralisasi, yang memungkinkan setiap daerah untuk mengelola pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal mereka (rasiman, 2022).

Pengertian otonomi pendidikan sesungguhnya terkandung makna demokrasi dan keadilan sosial, di mana masyarakat berhak berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pendidikan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 Pengertian otonomi dalam konteks desentralisasi pendidikan, menurut Tilaar mencakup enam aspek, yakni:

- (1) Pengaturan perimbangan kewenangan pusat dan daerah,
- (2) Manajemen partisipasi masyarakat dalam pendidikan,

- (3) Penguatan kapasitas manajemen pemerintah daerah,
- (4) pemberdayaan bersama sumber daya pendidikan,
- (5) hubungan kemitraan “stakeholders” pendidikan
- (6) pengembangan infrastruktur social (mansyur, 2023)

Otonomi pendidikan menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 adalah terungkap pada Hak dan Kewajiban Warga Negara, Orang tua, Masyarakat dan Pemerintah. Pada bagian ketiga Hak dan Kewajiban Masyarakat Pasal 8 disebutkan bahwa “Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan; pasal 9 Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan”(Indrawan, 2024).

Begitu juga pada bagian keempat Hak dan Kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah, pasal 11 ayat (2) “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun”. Khusus ketentuan bagi Perguruan Tinggi, pasal 24 ayat (2) “Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat”(Rajagukguk et al., 2023).

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep otonomi pendidikan mengandung pengertian yang luas mencakup filosofi, tujuan, format dan isi pendidikan serta manajemen pendidikan itu sendiri. Implikasinya adalah setiap daerah otonomi harus memiliki visi dan misi pendidikan yang jelas dan jauh ke depan dengan melakukan pengkajian yang mendalam dan meluas tentang trend perkembangan penduduk dan masyarakat untuk memperoleh konstruk masyarakat di masa depan dan tindak lanjutnya, merancang sistem pendidikan yang sesuai dengan karakteristik budaya bangsa Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika.

2. Implementasi Otonomi Pendidikan Islam

Secara paradigmatis, pendidikan Islam adalah sebuah sistem pendidikan yang didasarkan pada visi, misi dan tujuan ajaran Islam. Secara umum, visi pendidikan Islam adalah sejalan dengan visi Islam sebagai rahmat bagi alam dengan diutusnya Nabi

Muhamad Saw. Visi itulah yang juga menjiwai aktivitas pendidikan Islam. Dalam al-Qur'an Surah Al-Ambiya:21:107 yang artinya:

“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam (QS. al-Ambiya'/21: 107).

Rasulullah saw. diutus agar risalah yang dibawanya menjadi rahmat bagi alam, khususnya manusia. Rahmat bagi manusia bermakna bahwa risalah itu untuk mewujudkan kemaslahatan (jalb al-mashâlih) dan mencegah kemafsadatan (dar'u al-mafâsid) dari manusia. Tujuan terwujudnya kemaslahatan dan tercegahnya kemafsadatan merupakan hasil atau konsekuensi dari penerapan totalitas Islam (Basri, 2021).

Visi rahmatan lil'alam dalam pendidikan adalah bahwa pendidikan mengemban visi kerahmatan yang Rasulullah Saw diutus untuk itu. Dengan visi ini, pendidikan Islam berupaya mengangkat harkat dan martabat manusia, mengeluarkan manusia dari kesesatan, kebodohan dan keterbelakangan dengan memberikan pendidikan yang sesuai fitrah dan merata bagi semua manusia (Umam, 2020). Dalam Islam, pendidikan merupakan salah satu urusan rakyat yang menjadi tanggung jawab pemerintah (al-ri'āyat al-syu'ūni al-ummah). Karena itu, penyelenggaraan pendidikan merupakan kewajiban negara terhadap rakyat. Negara dianggap lalai dari tanggung jawabnya jika tidak menyiapkan penyelenggaraan pendidikan yang memadai untuk rakyatnya, tentunya sesuai kemampuan negara (Nurhayati et al., 2022).

Prinsip ini mengandung makna bahwa pendidikan merupakan salah satu sistem dari sistem-sistem lainnya dalam negara yang dijalankan secara terpadu sebagai pelaksanaan syariat Islam oleh negara. Hal itu mengharuskan bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan, negara menjadikan politik dan ekonomi sebagai basis kekuatan operasionalnya. Dengan kekuatan politik, negara akan melahirkan kebijakan-kebijakan terkait regulasi, implementasi, kontrol dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan dengan kekuatan ekonomi, negara akan mengalokasikan anggaran negara yang maksimal untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan sebagaimana urusan masyarakat lainnya (Subronto et al., 2021).

Dalam paradigma holistik pendidikan Islam seperti ini tidak akan terdapat diskriminasi negara terhadap pendidikan, tidak dikenal istilah pendidikan unggulan

karena semua pendidikan harus unggul sehingga tidak terdapat perbedaan perlakuan antara ibukota negara dengan di pelosok, kecuali jika terdapat aspek-aspek teknis yang diperlukan. Dengan demikian, negara tidak akan membebankan biaya penyelenggaraan pendidikan pada individu dan masyarakat sebagaimana negara tidak akan membebankan biaya kesehatan, biaya keamanan, dan biaya pembangunan infrastruktur kepada masyarakat (Mugiarto et al., 2022).

Keseluruhan beban biaya pelayanan masyarakat akan ditanggung oleh negara dengan optimalisasi pendapatan negara dari semua sektor anggaran pendapatan yang digariskan oleh syariat. Dengan jaminan negara terhadap biaya pendidikan, lembaga pendidikan tidak perlu memikirkan bagaimana mendapatkan pemasukan dari peserta didik. Lembaga pendidikan akan mandiri dan bebas dari intervensi kepentingan komersial yang menjadikan pendidikan sebagai lahan bisnis para kapitalis. Kemandirian pendidikan seperti ini akan membuat manajemen pendidikan fokus pada aktivitas peningkatan mutu pendidikan untuk menggapai visi dan misi mendidik generasi Islam. Persoalan aspek- aspek dalam penyelenggaraan pendidikan, yang menyangkut asas, tujuan, dan kebijakan umum pendidikan tanggung jawab dan pelaksanaannya bersifat terpusat (sentralisasi). Aspek pelaksanaan manajemen secara teknis dan administratif, maka penyelenggaraannya bersifat mandiri (desentralisasi atau otonomi).

3. Manajemen otonomi pendidikan Islam di MTs Darunnajah Kabupaten Kerinci

Manajemen otonomi pendidikan Islam di MTs Darunnajah Kabupaten Kerinci memiliki peran strategis dalam menciptakan sistem pendidikan yang mandiri, inovatif, dan berkualitas. Otonomi pendidikan yang diterapkan memungkinkan lembaga ini untuk mengambil keputusan dalam berbagai aspek penting, seperti pengelolaan kurikulum, penentuan kebijakan, serta pengelolaan sumber daya, tanpa ketergantungan langsung pada pemerintah pusat atau daerah. Dengan demikian, manajemen otonomi memberikan kebebasan yang lebih besar dalam menciptakan program-program pendidikan yang lebih relevan dengan kebutuhan siswa dan kondisi lokal.

Namun, untuk memastikan bahwa otonomi ini dapat berjalan dengan efektif, diperlukan evaluasi yang sistematis dan mendalam. Salah satu pendekatan evaluasi yang tepat untuk menilai efektivitas manajemen otonomi pendidikan di MTs Darunnajah adalah model CIPP (Context, Input, Process, Product). Pendekatan ini dapat membantu

mengevaluasi aspek-aspek penting dalam manajemen pendidikan, mulai dari konteks kebijakan pendidikan, sumber daya yang tersedia, proses manajerial yang diterapkan, hingga produk atau hasil yang dihasilkan oleh sistem pendidikan tersebut.

Konteks merupakan aspek pertama yang perlu dianalisis dalam penelitian ini. Di MTs Darunnajah, konteks kebijakan pendidikan Islam dan kondisi sosial budaya lokal sangat mempengaruhi pelaksanaan manajemen otonomi. Madrasah ini beroperasi di tengah masyarakat yang sangat menghargai nilai-nilai Islam, yang memberikan pengaruh besar terhadap perencanaan kurikulum dan kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan yang diterapkan oleh pemerintah juga menjadi faktor penentu dalam pembentukan kebijakan internal madrasah.

Input mencakup sumber daya yang ada di MTs Darunnajah. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya, baik dalam hal tenaga pendidik maupun infrastruktur. Meskipun madrasah ini memiliki otonomi dalam pengelolaan kurikulum, keterbatasan dana dan kurangnya pelatihan bagi guru-guru dapat mempengaruhi kualitas pembelajaran. Dalam konteks ini, penting untuk mengevaluasi bagaimana pengelolaan sumber daya, baik dari segi finansial maupun tenaga pengajar, berkontribusi pada kualitas pendidikan yang dihasilkan.

Selanjutnya, aspek proses dalam manajemen otonomi pendidikan di MTs Darunnajah perlu dikaji untuk mengetahui bagaimana pengelolaan pendidikan berlangsung. Proses ini mencakup perencanaan program pendidikan, implementasi kebijakan, serta pengelolaan kegiatan pembelajaran di kelas. Pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti kepala madrasah, guru, dan pihak terkait lainnya, menjadi penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan manajemen otonomi. Pengelolaan yang transparan dan kolaboratif akan menciptakan suasana pendidikan yang lebih efektif dan harmonis.

Terakhir, produk yang dihasilkan dari manajemen otonomi pendidikan harus dievaluasi. Produk ini mencakup hasil belajar siswa, kualitas pengajaran, serta pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, evaluasi dapat melihat apakah penerapan otonomi dalam pengelolaan pendidikan telah meningkatkan prestasi siswa, baik dalam aspek akademik maupun non-akademik. Produk juga

mencakup dampak jangka panjang terhadap kualitas pendidikan yang lebih baik dan relevansi kurikulum dengan perkembangan zaman.

Secara keseluruhan, evaluasi manajemen otonomi pendidikan Islam di MTs Darunnajah dapat memberikan wawasan penting mengenai kelebihan dan kekurangan dalam penerapan otonomi pendidikan. Hasil evaluasi ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang berguna untuk meningkatkan pengelolaan pendidikan di madrasah, baik dari segi kualitas pengajaran, kurikulum, maupun penggunaan sumber daya yang lebih efektif. Oleh karena itu, penggunaan metode evaluasi seperti model CIPP sangat relevan untuk menilai berbagai aspek yang terkait dengan manajemen otonomi pendidikan Islam di MTs Darunnajah Kabupaten Kerinci.

IV. KESIMPULAN

1. Kesimpulan
 - a. Konsep otonomi pendidikan mengandung pengertian yang luas mencakup filosofi, tujuan, format dan isi pendidikan serta manajemen pendidikan itu sendiri. Implikasinya adalah setiap daerah otonomi harus memiliki visi dan misi pendidikan yang jelas dan jauh ke depan dengan melakukan pengkajian yang mendalam dan meluas tentang trend perkembangan penduduk dan masyarakat
 - b. Implementasi otonomi pendidikan Islam adalah bahwa otonomi dalam pendidikan Islam sangat penting untuk menjaga nilai-nilai, prinsip, dan tujuan pendidikan yang sesuai dengan ajaran Islam. Otonomi ini memungkinkan lembaga pendidikan Islam untuk menjalankan kebijakan, kurikulum, serta metode pengajaran yang selaras dengan nilai-nilai moral dan etika Islam tanpa campur tangan yang berlebihan dari pihak luar.
 - c. evaluasi manajemen otonomi pendidikan Islam di MTs Darunnajah dapat memberikan wawasan penting mengenai kelebihan dan kekurangan dalam penerapan otonomi pendidikan. Hasil evaluasi ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang berguna untuk meningkatkan pengelolaan pendidikan di madrasah, baik dari segi kualitas pengajaran, kurikulum, maupun penggunaan sumber daya yang lebih efektif. Oleh karena itu, penggunaan metode evaluasi seperti model CIPP sangat relevan untuk

menilai berbagai aspek yang terkait dengan manajemen otonomi pendidikan Islam di MTs Darunnajah Kabupaten Kerinci.

B. Saran

Lembaga pendidikan Islam harus memperkuat kurikulum yang berbasis nilai-nilai Islam dengan tetap mengikuti perkembangan zaman. Kurikulum yang holistik akan membekali siswa dengan pengetahuan intelektual dan moral yang seimbang, tanpa meninggalkan ajaran agama. Otonomi pendidikan Islam hanya dapat berjalan efektif jika didukung oleh tenaga pendidik yang kompeten dan memahami prinsip-prinsip pendidikan Islam.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, M., Erdayani, R., Afandi, S. A., & Rafi, M. (2022). Analisis kebijakan otonomi pendidikan di Indonesia: Analysis of Education Autonomy Policy in Indonesia. *Journal of Government Science (GovSci) : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(2), 85–99. <https://doi.org/10.54144/govsci.v3i2.32>
- amini, amini, & ginting, nurman. (2020). Otonomi Pendidikan di Masa Krisis Pandemi Covid 19 (Analisis Peran Kepala Sekolah). *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial & Keislaman*, 5(2), 78.
- Basri, H. (2021). Otonomi Pendidikan Islam: Tantangan dan Harapan. *Jurnal Kependidikan Islam*, 7(2), 23.
- hidayat, eko. (2020). Strategi Pengelolaan Sampah Sebagai Upaya Peningkatan Pengelolaan Sampah di Era Otonomi Daerah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 12(2), 7.
- Indrawan, I. (2024). Fungsi Lembaga Dalam Pelaksanaan Otonomi Pendidikan. *Jurnal IHSAN Jurnal Pendidikan Islam*, 2(1), 71–80. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v2i1.104>
- Lawati, S. (2021). Metode Peningkatan Mutu di Era Otonomi Pendidikan. *Journal of Practice Learning and Educational Development*, 1(1), 17–21. <https://doi.org/10.58737/jpled.v1i1.15>
- mansyur, munir. (2023). Refleksi Otonomi Pendidikan Tantangan Dan Peluang Di Era Saat Ini. *Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*, 7(1), 78.
- Mugiarto, M., Wasliman, I., & Handayani, S. (2022). Implikasi Kebijakan Otonomi Daerah terhadap Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam. *Jurnal Kridatama Sains dan Teknologi*, 4(01), 74–86. <https://doi.org/10.53863/kst.v4i01.483>

- Nurhayati, N., M. Nasir, Abdul Mukti, A. Safri, Lias Hasibuan, & Kasful Anwar. (2022). Manajemen Pembiayaan Pendidikan Pendidikan Dalam Meningkatkan Mutu Lembaga Pendidikan Islam. *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*. 3(2), 594–601. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v3i2.1123>
- Rajagukguk, J., Panjaitan, M., Lumban Gaol, D. S. R., & Gea, S. D. N. (2023). Otonomi Pendidikan Di Era Industri 4.0. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik*, 3(1), 124–130. <https://doi.org/10.51622/jispol.v3i1.1349>
- rasiman, imam. (2022). Pola Manajemen Sekolah dalam Perspektif Otonomi Pendidikan. *Qudwatuna*, 5(2), 12.
- Ristianah, niken. (2022). Konsep Manajemen Mutu Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Islam*, 4(1), 89.
- Subronto, S., Ali, H., & Imron Rosadi, K. (2021). Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Pendidikan Islam: Sistem Pendidikan, Pengelolaan Pendidikan dan Tenaga Pendidikan,. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 3(1), 24–34. <https://doi.org/10.31933/jemsi.v3i1.671>
- Umam, M. (2020). Dinamisasi Manajemen Mutu Perspektif Pendidikan Islam. *Jurnal Al Hikmah*, 8(1), 78.